

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tertera dengan jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dari undang-undang yang ada ini dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur dan pembangunan lainnya di daerah mereka masing-masing. Sebagaimana pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah ke pemerintah daerah masing-masing maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara Negara dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan serta mampu menjadi faktor pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk melihat tingkat

perkembangan dan kemajuan masyarakat dilihat dari tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu sendiri.

Pelayanan pemerintah daerah ke masyarakat dapat dilihat dengan adanya kebijakan-kebijakan dalam pembangunan daerah. Salah satu dasar dalam pembangunan daerah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang dimiliki dengan melihat potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Hal ini mengarahkan pada pengambilan keputusan dari daerah tersebut dalam proses pembangunannya yang bertujuan menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah serta masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang ada harus bisa mengelola potensi daerahnya sebaik mungkin untuk kemajuan bersama terutama bagi perkembangan industri kecil atau UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) daerah (Rochmawati Dkk, 2015)

Pemerintah daerah Kabupaten Sikka sendiri dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka memiliki tugas memberdayakan UMKM yang ada di Kabupaten Sikka. Beberapa UMKM yang diberdayakan merupakan produk unggulan di Kabupaten Sikka. Salah satu produk unggulan yang ada di kabupaten Sikka ialah tenun ikat. Industri rumahan ini merupakan kerajinan yang diwariskan secara turun temurun dan saat ini

mengalami perubahan yang cukup pesat. Guna melindungi warisan kesenian daerah ini maka Tenun Ikat Sikka telah dilindungi kekayaan intelektualnya melalui Indikasi Geografis dengan sertifikat ID G 000000056 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 8 Maret 2017. Dimana dengan ini menjadikan tenun Sikka menjadi tenun ikat yang pertama memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk tenun ikat itu sendiri, sehingga memberikan dampak pada peningkatan harga jual produk yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat penunun dengan memproduksi Tenun Ikat Sikka.

Keunggulan tenun ikat Kabupaten Sikka tidaklah terlepas dari para pelaku usaha tenun ikat yang memiliki prinsip yaitu mempertahankan tradisi secara dinamis tetapi tetap membuka diri untuk menerima inovasi teknis yang dianggap berguna yang dilandasi ketekunan dan pantang menyerah dalam menjalankan profesinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kelompok tenun ikat yang dengan konsisten masih mempertahankan motif, proses produksi dan pewarna yang masih menggunakan pewarna alam. Salah satu kelompok tenun ikat di Kabupaten Sikka yang masih menggunakan pewarna alam yakni kelompok tenun Mbola So yang berlokasi di Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan kelompok Tenun Ikat Mbola So sangat penting sebagai tempat mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Kelurahan Hewuli. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat di kelurahan Hewuli merupakan para pengungsi yang berasal dari Kecamatan Palue, sehingga menenun menjadi salah satu alternatif bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun dalam melaksanakan kegiatan produksinya banyak kendala yang sering dihadapi oleh para pengrajin, seperti masalah pemasaran dan modal. Dalam hal pemasaran kelompok tenun ikat Mbola So sendiri sudah memasarkannya dengan turun langsung ke pasar dan juga melalui media online, tetapi terdapat juga kendala lain yang dihadapi oleh kelompok tenun ikat ini. Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Sikka mengatakan harga tenun ikat masih ditentukan oleh pembeli (Oscar Pareira: 2018). Pengrajin tenun ikat sudah sangat sulit untuk menghasilkan karya seni berupa kain tenun NTT, tetapi tidak diimbangi oleh harga kain yang pantas. Berdasarkan pernyataan dari ketua kelompok tenun ikat Mbola So dalam wawancara ia mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi dalam memasarkan kain tenun ikat itu seperti, kurangnya minat pembeli terhadap kain tenun ikat yang diproduksi oleh kelompok kami. Ini dikarenakan kain tenun ikat yang diproduksi oleh kelompok kami harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga tenun ikat yang ada dipasaran. Harga yang mahal tersebut sesuai dengan kualitas, tingkat kesulitan dan juga lamanya proses pengerjaan untuk menghasilkan selembar kain tenun ikat di kelompok kami” (Erni, wawancara, 11 Juni 2022).

Guna meningkatkan lagi kualitas produksi kain tenun ikat dan mengeksplorasi produk turunan dari tenun ikat maka dibutuhkan pelatihan, hal ini bertujuan agar nantinya produk kain tenun yang dihasilkan dapat diminati oleh pasar. Maka dari itu pemerintah terutama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka diharapkan ikut ambil bagian dalam mendukung pelatihan yang ada bagi penenun, sehingga tenun ikat Sikka mampu bersaing dalam dunia industri modern yang menimbulkan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka (poskupang: 2018).

Sedangkan dalam hal modal juga terdapat juga kendala yang dihadapi oleh kelompok tenun ikat ini. Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok tenun ikat Mbola So ia menyatakan bahwa:

“Dalam hal modal kendala yang ada dari kelompok tenun kami ini banyak mulai dari benang, alat ikat tenun, bahan baku dan rumah tenun ikat belum ada. Modal dari pemerintah sampai sekarang ini juga belum ada, kami mama-mama dari kelompok ini mandiri membentuk koperasi Mbola So untuk membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan” (Erni, wawancara, 11 Juni 2022).

Usaha tenun ikat di Flores, NTT, masih terkendala minimnya dukungan permodalan bagi masyarakat penenun (kupang.tribunnews:2018). Modal atau dana yang kurang, dapat menjadikan para pelaku usaha tidak bisa melanjutkan ke proses produksi yang selanjutnya. Jika dilihat dari sumber modalnya maka kelompok tenun ini menggunakan jenis modal internal dimana modal ini

bersumber dari dana yang dimiliki oleh kelompok usaha. Sedangkan modal yang berasal dari pihak luar atau disebut juga jenis modal eksternal sampai sekarang, belum juga didapatkan oleh kelompok tenun ikat ini. Dikarenakan modal yang kecil membuat kelompok tenun ikat ini seringkali mengalami kendala kekurangan bahan baku, seperti benang dan juga alat-alat tenun lainnya yang nantinya digunakan untuk memproduksi kain tenun ikat. Hal ini merupakan salah satu tugas dari aparat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan misinya yang ke tiga yaitu “Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah”.

Melihat permasalahan yang ada pada proses produksi kelompok tenun ikat Mbola So, tentunya peran pemerintah daerah Kabupaten Sikka sangat diperlukan dalam hal ini peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka. Seharusnya keberadaan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengembangkan dan memberdayakan produk tenun ikat kelompok tenun ikat Mbola So yang menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Sikka agar tetap bertahan. Permasalahan lain yang dihadapi para pengerajin kelompok tenun ikat Mbola So yakni belum mendapatkan perhatian dan bantuan pemerintah Kabupaten Sikka terlebih khususnya Dinas Perdagangan, dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus mengembangkan produksi tenun ikat yang

menjadi ciri khas Kabupaten Sikka diharapkan dapat meningkatkan pula perekonomian masyarakat khususnya para penenun.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka terhadap produksi tenun ikat pada kelompok tenun ikat Mbola So. Oleh karena itu berdasarkan pernyataan di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka Terhadap Produksi Kain Tenun Ikat (Studi pada Kelompok Tenun Ikat Mbola So di Kabupaten Sikka)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka terhadap produksi tenun ikat yang ada di kelompok tenun ikat Mbola So?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka terhadap produksi tenun ikat yang ada di kelompok tenun ikat Mbola So.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai peran pemerintah daerah khususnya peran pemerintah terhadap sektor UMKM dalam hal ini mengenai produksi tenun ikat daerah.

b. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sikka pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan tenun ikat daerah di Kabupaten Sikka sehingga dapat menjadi sektor UMKM yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah

c. Penelitian selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan kajian tambahan yang valid untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap produksi kain tenun daerah.